

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya TKI bukan persoalan yang mudah untuk diurus, pertambahan jumlah warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, banyaknya calon TKI yang kurang terampil dan rendahnya pendidikan adanya sejumlah kasus kekerasan terhadap TKI, masih menjadi pekerjaan rumah dari semua pihak yang berkaitan langsung dengan dunia ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri, seperti Pemerintah, DPR, Parpol, LSM, Serikat Buruh Migran, PJTKI dan TKI.

Skripsi ini secara khusus membahas hubungan antara PJTKI (dalam hal ini PJTKI Pancamanah Utama Jakarta) dengan TKI yang telah direkrut, dilatih dan dikirim ke luar negeri. penulis menganggap penting untuk membahas hal itu sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak yang ingin memperbaiki dan meningkatkan dunia ketenagakerjaan (khususnya TKI di luar negeri) yang selama ini hanya menjadi cerita sedih bagi bangsa

Peneliti memakai teori pilihan rasional sebagai kerangka teori untuk membahas hubungan antara PJTKI Pancamanah Utama Jakarta dengan TKI. Menurut

teori pilihan rasional, dalam hubungan antara satu individu dengan individu atau antara individu dengan institusi sosial, setiap pihak akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, bukan berarti bahwa relasi itu adalah relasi konflik demi pencapaian tujuan yang maksimal dari masing-masing tetapi mereka membangun jaringan-jaringan hubungan yang disebut *embededness* (keterlekatan, untuk menghasilkan kepercayaan, dalam memperkuat harapan dan menegakkan norma.

Pertama, oleh karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan murahnya upah tenaga kerja di Indonesia, maka banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Banyak dari pencari kerja tersebut menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Kedua, terdapat beberapa faktor penarik negara luar menjadi pilihan para TKI bekerja disana seperti upah yang tinggi yang diberikan oleh negara luar, karena kuatnya faktor pendorong yaitu dorongan kebutuhan ekonomi, cerita tentang negeri yang menjanjikan dan adanya dorongan dari keluarga.

Ketiga, makna pengiriman TKI sendiri menimbulkan adanya peningkatan kesejahteraan baik TKI sendiri maupun keluarga yang ditinggalkan, selain itu

pengiriman TKI juga bermakna pada peningkatan devisa negara. Para TKI dikirim tidak hanya memperoleh keuntungan berupa uang tetapi juga keuntungan dalam hal peningkatan keterampilan kerja. Hal yang penting adalah pengiriman TKI juga bermakna pada pengurangan masalah pengangguran di dalam negeri.

Keempat, pentingnya peran pihak yang berkaitan langsung dengan TKI seperti seperti Pemerintah, DPR, Parpol, LSM, Serikat Buruh Migran, PJTKI. Khususnya PJTKI yang keberadaannya dimaknai sebagai instansi yang berwenang dan mempunyai tugas untuk merekrut, melatih, dan memberangkatkan calon TKI ke luar negeri dan memiliki tanggung jawab terhadap TKInya dari masa pra penempatan, penempatan hingga purna penempatan.

2. Saran

Faktor lapangan kerja yang sempit dan kebutuhan ekonomi yang mendesak menyebabkan minat sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan bekerja ke luar negeri. Namun, sayangnya masih terdapat potret kasus kekerasan yang terjadi pada TKI dapat dilihat secara jelas dimana media massa gencar memberitakan tentang penganiayaan yang dialami oleh PRT migran. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia menjalankan prinsip keadilan, pemenuhan hak, kebebasan dan kesetaraan bagi segenap masyarakat Indonesia, tak terkecuali para TKI yang bekerja di luar negeri

yang sudah berjasa menambah devisa bagi negara Indonesia. Poin penting dalam demokrasi sendiri adalah kesetaraan politik dan partisipasi politik yang dilakukan antara TKI dan pihak yang bertanggung jawab atas TKI (Pemerintah, DPR, Parpol, LSM, Serikat Buruh Migran, PJTKI). Namun untuk membangun partisipasi aktif dari para TKI, perlu ada langkah pemberdayaan terlebih dahulu sebuah pemahaman bahwa partisipasi politik dari mereka adalah penting. Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan para TKI ada beberapa langkah yang perlu dilakukan :

1. Melakukan pemberdayaan terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri dengan jalan memberikan pendidikan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar para TKI memahami terlebih dahulu apa itu politik serta menjadi tenaga kerja yang kritis dan melek hak politik. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah bagi seorang TKI tentunya dibutuhkan pelatihan khusus yang intensif.
2. Pemberdayaan tersebut harus hasil sinergi antara Pemerintah, DPR, Parpol, LSM, Serikat Buruh Migran, PJTKI sebagai aktor formal. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi pemahaman antara kedua belah pihak dalam melakukan peningkatan kualitas keterampilan dan mekanisme penempatan yang baik mulai dari tahap pra penempatan hingga purna penempatan. Pemberdayaan TKI yang terencana dan terkoordinasi sejak tahap pra penempatan dapat membangun kualitas buruh migran perempuan Indonesia yang kritis, cerdas, dan melek informasi serta hukum negara setempat.